Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Konflik Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2012-2017

Maria Ulfa Aulia

Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konflik yang terjadi yakni antara Bupati Pati Haryanto dengan Wakil Bupati Pati tak lain adalah Budiyono. Rumor ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Pati makin kentara. Mulai dari acara inbox SCTV dialun alun Pati, beberapa waktu lalu, kemudian acara pelantikan IKKP (Ikatan Keluarga Kabupaten Pati), dan terakhir saat upacara hari santri, mereka tak lagi terlihat bersama. Bahkan di baliho promosi tentang pasar pragola di beberapa ruas jalan, tak terlihat gambar Bupati dan Wakil Bupati yang masih menjabat. Hanya ada foto Bupati Haryanto yang terkadang bersama Ibu Musus, istrinya.

Kata Kunci: Konflik, Bupati, Pati.

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dimana masyarakatnya memiliki pluralis yang cukup tinggi. Dimana negara ini merupakan satu kesatuan dari beragam jenis suku, bahasa, ras, dan kelas sosial yang berbeda-beda. Pada intinya Indonesia merupakan negara multikultural, memiliki beranekaragam jenis masyarakat yang tentunya berbeda-beda.

Hal diatas memicu rawan terjadinya konflik dimasyarakat karena adanya berbagai macam kepentingan baik individu maupun golongan. Konflik yang terjadi pada masyarakat sipil dari kalangan menengah bawah, menengah ke atas, bahkan para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan pun rawan terjadi konflik. Adanya banyak konflik merupakan hal yang wajar. Bahkan dalam masyarakat pun disarankan tetap ada konflik sebagai pemicu agar masyarakat dapat terus bergerak maju. Namun konflik yang tidak kunjung selesai juga akan bisa berakibat fatal dan merugikan banyak masyarakat lainnya. Oleh karena itu konflik memang boleh tetap ada, namun juga harus ada batasan-batasan hukum yang diatur oleh Undang-Undang agar konflik tersebut menemui pihak yang memediasi dan tidak berlarut-larut.

Pati merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga tentu pernah mengalami sebuah konflik dalam masyarakatnya. Konflik baik dari antar masyarakat sipil seperti pembacokan dan tawuran juga sering terjadi di Pati. Namun ada juga konflik yang terjadi antara pejabat di Pemerintahan Kabupaten Pati. Beberapa media sempat memberitakan beberapa kali konflik terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2012-2017 yakni, Hariyanto dan Budiono. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai konflik yang terjadi beberapa kali antara Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2012-2017 secara lebih dalam di pembahasan makalah kali ini.

Pembahasan

Konsep Manajemen Konflik

Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin, *confligere*, yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonistis atau saling bertentangan

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

(Kartono, 2012: 245).

Manajemen konflik adalah penerapan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik maupun pihak lain yang tidak terlibat, dalam menghadapi/mengendalikan suatu konflik yang timbul dalam suatu organisasi dalam rangka mengarahkan perselisihan untuk menghasilkan resolusi yang diinginkan sehingga tercapai tujuan organisasi. Selanjutnya dari definisi-definisi tersebut, terdapat sejumlah kata kunci dalam manajemen konflik yang perlu digaris bawahi, yaitu:

- a. Pihak yang terlibat konflik. Manajemen konflik dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik atau pihak lain.
- b. Strategi konflik. Manajemen konflik merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk memanaajemi konflik.
- c. Menghadapi/mengendalikan konflik. Pihak yang menghadapi konflik, manajemen konflik merupakan aktivitas mengendalikan konflik, demi menciptakan keluaran konflik yang menguntungkan.
- d. Resolusi konflik, jika manajemen konflik bertujuan untuk mencari solusi yang diterima oleh masing-masing pihak.
- e. Kemampuan beradaptasi. Organisasi yang sehat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun lingkungan internalnya.
- f. Memfokuskan pada tujuan. Aktivitas dan anggota organisasi yang sehat akan memfokuskan diri pada pencapaian tujuan.

Robbin (1996: 431) dalam Wahyudi (2011:15) membagi transisi pemikiran tentang konflik ke dalam tiga fase, yaitu:

- a. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang – orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.
- b. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
- c. Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan kreatif.

Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi dalam suatu organisasi atau konflik di tempat kerja. Konflik interpersonal adalah konflik pada suatu organisasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan saling tergantung dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Konflik interpersonal terdapat dalam tujuh macam bentuk. Berikut adalah ketujuh macam bentuk tersebut:

- a) Konflik antar manajer

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

- b) Konflik antara pegawai dan manajer
- c) Konflik hubungan industrial
- d) Konflik antar kelompok kerja
- e) Konflik antara anggota kelompok kerja dan kelompok kerjanya
- f) Konflik interes (conflict of onterest)
- h) Konflik antara organisasi dan pihak diluar organisasi.

Wirawan (2009:62) juga membagi konflik berdasarkan bidang kehidupan yang menjadi obyek konflik. Namun sering kali, suatu jenis konflik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan lain. Berikut adalah contoh-contoh konflik multidimensi yang dialami Indonesia, yaitu:

- a. Konflik ekonomi. Konflik ekonomi adalah perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas, misalnya senketa lahan pertanian antara anggota masyarakat dan perusahaan perkebunan.
- b. Konflik bisnis. Konflik bisnis terjadi karena keinginan setiap pengusaha untuk menguasai bagian pasar seluas mungkin, sehingga dapat menimbulkan monopoli.
- c. Konflik potitik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlah yang terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau ideologinya; konflik agama.
- d. Konflik agama bisa terjadi diantara dua pemeluk agama yang berbeda atau diantara pemeluk agama yang sama. Konflik agama adalah konflik diantara pemeluk/penganutnya, bukan konflik dengan ajaran agama.
- e. konflik social. Konflik social timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok social yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, karena kemiskinan, atau karena terjadinya migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lain.
- f. Konflik budaya. Masyarakat beragam jenisnya oleh karena itu budayanya beragam. Kergaman budaya menimbulkan keragaman sikap dan perilaku yang dapat memunculkan konflik.

Menurut gambar di atas, terdapat lima model penyelesaian konflik, yaitu:

Penghindaran

Penyelesaian model ini dengan kegigihan rendah dan kebermanjaamaan rendah (Kuadran I). Dalam model ini konflik cenderung didiamkan, masing-masing pihak menghindarkan diri seperti tidak terjadi apa-apa.

Kompetisi atau Pemaksaan

Penyelesaian model ini dengan kegigihan tinggi dan kebermanjaamaan rendah(kuadran II). Dalam model ini ada salah satu pihak yang menggunakan wewenang untuk memaksa pihak lain menerima apa yang telah diputuskan oleh yang berwenang.

Penyesuaian Diri

Penyelesaian model ini dengan kegigihan rendah, kebermanjaamaan yang tinggi (kuadran III). Penyelesaian model ini yang terpenting hubungan antar anggota organisasi terbina dengan baik, sehingga pihak yang satu menyesuaikan pihak yang lain.

Kompromi

Penyelesaian model ini dengan kegigihan sedang dan kebermanjaamaan sedang (kuadran IV). Dalam model ini terjadi adanya tawar menawar antara kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak jarang masuk dalam penyelesaian konflik sebagai penengah.

Kolaborasi

Terdapat kegigihan yang tinggi dan kebermanjaamaan yang tinggi pula (kuadran V). Pihak-pihak yang berkonflik berusaha menemukan solusi yang terbaik atas konflik yang

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

dialami.

Profil Kabupaten Pati

Kabupaten Pati, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat.

Kota Pati terletak di daerah Pantura (Pantai Utara) dekat dengan laut utara pulau Jawa. Kota ini terdiri lebih dari 20 kecamatan, diantaranya adalah kecamatan Gabus, Tambakromo, Winong, dan lainnya.

Sejarah dan Profil Kabupaten Pati - Jawa Tengah Kota Pati termasuk dalam eks karisidenan yang meliputi wilayah Kudus, Jepara, Blora. Kota ini masih berada di wilayah propinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Pati beragam, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, PNS, buruh, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai paranormal, bahkan untuk profesi tersebut sudah diakui oleh masyarakat Indonesia, ataupun masyarakat dunia khususnya di Asia. Situs-situs peninggalan masyarakat terdahulu masih menyimpan misteri untuk dapat diungkapkan. Hal ini terjadi karena dulunya wilayah Pati merupakan daerah kerajaan Majapahit dan Mataram.

Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri, yang pada waktu ini menjadi daerah kekuasaan Majapahit, dan kemudian di ambil alih oleh Mataram. Di Kota Pati terdapat situs-situs peninggalan zaman kerajaan, diantaranya Pintu Gerbang Majapahit konon gerbang ini terjatuh ketika akan di bawa ke wilayah Jawa Timur yang pada waktu itu menjadi pusat wilayah kerajaan Majapahit.

Masyarakat Pati dikenal sebagai masyarakat abangan, juga ada beberapa dari kalangan santri dan masyarakat Konghucu dimana terdapat beberapa pesantren dan kompleks Pecinan. Beberapa pula masih ada masyarakat keturunan Samin yang bisa ditemui di beberapa daerah di Pati terutama di daerah Sukolilo.

Profil Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2012-2017

Profil Bupati Pati – Haryanto

H. Haryanto, SH, MM, M.Si. adalah bupati Pati yang menjabat pada periode 2012-2017. Ia bersama wakilnya Budiyo berhasil memenangkan Pilkada Pati 2011 dan dilantik pada 7 Agustus 2012 sebagai Bupati Pati ke-41.

Pada Pilkada Kabupaten Pati 2017, ia juga ikut mendaftar bersama Saiful Arifin sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pati periode 2017-2022. Bakal pasangan calon yaitu H. Haryanto, SH, MM, M.Si dan Saiful Arifin didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik; PDI-P, P. Gerindra, PKB, P.Demokrat, P. Golkar, P. Hanura, PKS dan PPP dengan total dukungan 46 kursi.

Informasi Pribadi

Lahir: 8 April 1964 Pati, Jawa Tengah

Alamat rumah / tempat tinggal: Desa. Raci, RT 3 RW 5 Batangan Pati

Agama: Islam

Pekerjaan: PNS Pemerintah Kabupaten Pati

Kebangsaan: Indonesia

Istri: Dra. Musus Indarnani

Anak: Tresya Okta Vera W (Pati 11 Oktober 1994), Harani Putri Diszawanti (Pati, 10 Desember 2000)

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Riwayat Jabatan

- a. Kepala BKD Kabupaten Pati (2007 s/d sekarang)
- b. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati (2009 s/d 2011)
- c. Camat Juwana Kabupaten Pati (2002 s/d 2006)
- d. Camat Trangkil Kabupaten Pati (2001 s/d 2002)
- e. Camat Sukolilo Kabupaten Pati (2000 s/d 2001)
- f. Sekwilcam Juwana Kabupaten Pati (1998 s/d 2000)
- g. Pejabat Kepala Desa Growong Lor Kec. Juwana Kabupaten Pati (1996 s/d 1998)
- h. Kasubsi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pati (1995 s/d 1996)
- i. Kasubbag Perangkat dan administrasi Desa Setda Kabupaten Pati (1995 sd 1996)

Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Besar Juwana
- b. Mutasar MWC Kec. Juwana
- c. Ketua Bidang Sosial Madhorot NU Kab. Pati
- d. Wakil Ketua Majelis Ta'lim NU Kab. Pati
- e. Ketua PMI Cabang Pati

Profil Wakil Bupati Pati – Budiyo

- a. Nama: H. Budiyo
- b. Alamat: Desa Pasucen Rt 4 Rw 1 Kec. Trangkil
- c. Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 15 Juni 1968
- d. Agama: Islam.

Data Keluarga

- a. Istri : Wuwuh Asrining Pur
- b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- c. Anak : - Achmad Rizky Goratama - Pati, 20 Pebruari 1996
- Achmad Naufal Syauqi - Pati, 11 September 1999
- A'isy A'isy Humairo - Pati, 30 April 2007

Riwayat Pendidikan

- a. Sdn Pasucen I
- b. Smpn Margoyoso
- c. Sma Pati

Riwayat Pekerjaan

- a. Pengusaha
- b. Kaur Keuangan Desa Pasucen Kec. Trangkil
- c. Kepala Desa Pasucen Kec. Trangkil Periode I Tahun 1998 S/D 2008 periode II Tahun 2008 S/D - Sekarang

Riwayat Organisasi

- a. Ketua Ii Yayasan Assalam Desa Pasucen Kec. Trangkil
- b. Ketua Ii Ta'mir Masjid Al Huda Desa Pasucen Kec. Trangkil

Konflik Bupati dan Wakil Pati 2012-2017

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Konflik yang terjadi yakni antara Bupati Pati Haryanto dengan Wakil Bupati Pati tak lain adalah Budiyono. Rumor ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Pati makin kentara. Mulai dari acara inbox SCTV dialun alun Pati, beberapa waktu lalu, kemudian acara pelantikan IKKP (Ikatan Keluarga Kabupaten Pati), dan terakhir saat upacara hari santri, mereka tak lagi terlihat bersama. Bahkan di baliho promosi tentang pasar pragola di beberapa ruas jalan, tak terlihat gambar Bupati dan Wakil Bupati yang masih menjabat. Hanya ada foto Bupati Haryanto yang terkadang bersama Ibu Musus, istrinya.

Pecah kongsi semacam ini jamak terjadi diberbagai daerah. Terutama yang antara keduanya bersaing untuk menjadi calon incumbent pada periode berikutnya. Kursi di tenda kehormatan, pada posisi wakil bupati ternyata ditempati calon wakil bupati Saiful Arifin.

Anehnya, khusus untuk Kabupaten Pati, peran wakil bupati seperti telah lama tergantikan sejak Bupati Haryanto mantab mengganti pasangannya bersama pengusaha perhotelan dan telekomunikasi, Saiful Arifin. Kursi wakil bupati nampaknya seperti telah sah berpindah pemilik. Setelah Calon Wakil Bupati Pati Saiful Arifin yang memuji dan terkagum terhadap santri santri di Pati seraya mengunggah foto-foto dokumentasinya, netizen justru “gagal fokus” dengan statusnya. Netizen di Pati, terutama pengguna facebook di sejumlah facebook group malah mengomentari foto Arifin yang menempati posisi yang belum sah didudukinya.

Isu Konflik

Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati HM Budiono bakal bersaing ketat dalam perebutan pucuk pimpinan Kabupaten Pati tahun 2017 mendatang. Keduanya yang diusung partai Gerindra dalam Pilkada tahun 2012 lalu berhasil mengalahkan kandidat calon Imam Suroso yang diusung dari partai PDI Perjuangan. Diawal kepemimpinan keduanya sangat kompak bahkan mampu meraih berbagai Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat. Prestasi demi prestasi ditorehkan keduanya dalam memimpin pemerintahan di Kabupaten Pati. Namun sayang menginjak tahun keempat keduanya tidak mampu mempertahankan kembali untuk bergandengan dalam Pilkada tahun 2017.

Terbukti dalam penjaringan Calon Bupati yang dilaksanakan oleh partai PDI Perjuangan keduanya secara terpisah berjalan sendiri untuk pengambilan formulir pendaftaran Calon Bupati Pati. Keduanya menyatakan dalam Pilkada di Pati tahun 2017 akan terpisah dan siap bersaing untuk memperebutkan pucuk tertinggi di Kabupaten Pati. Bupati Haryanto menyatakan jika dirinya maju kembali karena dorongan dan dukungan semua pihak baik warga, pengusaha dan pihak lain untuk maju bersaing dalam Pilkada di Pati. Adapun Wakil Bupati Pati HM Budiono menyatakan siap untuk bersaing dalam Pilkada mendatang. Dengan dukungan semua pihak dirinya menyatakan siap maju di Pilkada 2017.

Ketua KPU Moch Nashik mengatakan jika Pilkada tahun ini akan berbeda dengan Pilkada kemarin. Dalam Pilkada 2017 tidak akan ada penghitungan suara secara prosentase. Perhitungan akan dilaksanakan secara global. Siapa yang meraih suara terbanyak dinyatakan pemenang dalam Pilkada, walaupun selisih suaranya hanya satu. Dengan demikian maka tidak akan ada Pilkada tahap dua.

Dari konflik tersebut yang terpapar dalam berita keluaran media tempo diatas, konflik muncul ketika Bupati Haryanto mulai cuti menjelang pemilu Kabupaten Pati karena beliau menjadi calon yang akan maju, namun tidak lagi didampingi oleh wakilnya yang dulu. Sehingga untuk sementara Budiyono menggantikannya untuk tetap mengatur pemerintahan. Adanya konflik tersebut karena adanya selisih paham mengenai nama-mana pejabat yang akan dilantik pada 5 Januari 2017 di lingkungan Pati.

Dari adanya konflik tersebut kemudian dibuat manajemen konflik untuk

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

mengatasinya. Sebelum melangkah lebih jauh penulis ingin mererefresh kembali mengenai pengertian dari manajemen konflik itu sendiri. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Dalam sebuah pemerintahan, organisasi, pekerjaan individual maupun sekelompok pekerja saling terkait dengan pekerjaan pihak-pihak lain. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasi sebagai komunikasi yang kurang baik.

Konflik yang mencoba penulis bahas lebih dalam pada kali ini adalah konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Pati menjelang Bupati Pati yakni Haryanto cuti untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2016 sehari sebelum beliau cuti. Para pejabat struktural atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dilantik. Padahal batas akhir pelantikannya adalah 5 Januari 2017. Akibatnya, mereka merasa resah karena adanya ketidakpastian pelantikan dan tertundanya pencairan gaji. Molornya pelantikan ini gara-gara ada tarik-menarik kepentingan antara Bupati Pati nonaktif Haryanto dan pelaksana tugas Bupati Pati Budiyono. Padahal Haryanto dan Budiyono adalah pasangan Bupati-Wakil Bupati Pati periode 2012-2017. Pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut Haryanto sudah menyusun pejabat yang menempati pos-pos baru. Sedangkan plt Budiyono ingin ada penataan pejabat secara terbuka sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak acak-acakan seperti selama ini. Saat dikonfirmasi, Budiyono tidak membantah adanya tarik menarik itu. Menurut dia, penataan pejabat yang ditempatkan di dinas dan badan-badan harus melalui aturan yang benar. Misalnya ada keterbukaan serta sebaiknya ada mekanisme di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) agar penempatan pejabat bisa berjalan fair. Budiyono juga heran susunan pejabat di Pati sudah ditetapkan Bupati Haryanto pada 27 Oktober 2016 atau sehari sebelum cuti. Sebab, ada aturan yang menyatakan kepala daerah yang mau maju lagi dalam pilkada tidak boleh memutasi sejak enam bulan sebelum ditetapkan sebagai seorang calon.

Budiyono menegaskan, dia tak memiliki kepentingan pribadi karena juga tidak menjadi calon dalam pilkada. Pelantikan pejabat struktural di Pemkab Pati harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Regulasi ini mengubah nomenklatur satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga pejabat strukturalnya juga ikut ditata ulang.

Sedangkan Haryanto mengklaim penyusunan pejabat di Pati sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia mendesak plt Bupati Pati segera melantik sesuai dengan persetujuan yang sudah diberikan Menteri Dalam Negeri. Haryanto juga menegaskan, hingga kini, ia masih menjadi bupati yang nonaktif. Sebab, ia baru lengser pada Agustus 2017. Dengan posisi seperti itu, Haryanto merasa masih menjabat bupati. Hanya saja, karena maju dalam pilkada, ia berstatus cuti. Menurut Haryanto, jika ingin membuat kebijakan, plt Bupati Pati harus berkonsultasi dengannya.

Dan pada tanggal 5 Januari 2017 ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat struktural jajaran Pemkab Pati, gagal dikukuhkan dan dilantik. Pasalnya, Plt. Bupati Pati mengingkari komitmennya, melaksanakan amanat surat Kemendagri untuk mengukuhkan dan melantik, tanpa alasan yang jelas.

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Ketidakhadiran Plt. Bupati Pati, Budiyono yang berujung batalnya pengukuhan dan pelantikan ASN dan pejabat struktural tersebut, mengundang kekecewaan DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin didampingi para Wakil Ketua DPRD mengaku kecewa. DPRD menilai Plt. Bupati Pati melanggar komitmen dalam pertemuan dengan Pimpinan DPRD, Sekda, Sekwan, serta BKD, terkait pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural tersebut.

Aktor dalam konflik tersebut jelas yakni Haryanto dan Budiyono yang tidak lain adalah Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2012-2017. Pihak yang memediasi yakni Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui telpon selulernya. Dalam pembicaraannya, Gubernur memerintahkan untuk membubarkan ratusan ASN dan pejabat struktural yang sudah menunggu empat jam, dan tidak perlu menunggu kehadiran Plt. Bupati.

Bentuk Mediasi

Atas sikap Plt. Bupati Pati, Budiyono, Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui telpon selulernya. Dalam pembicaraannya, Gubernur memerintahkan untuk membubarkan ratusan ASN dan pejabat struktural yang sudah menunggu empat jam, dan tidak perlu menunggu kehadiran Plt. Bupati.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berjanji sesuai surat Kemendagri tertanggal 30 Desember 2016 dan ditandatangani Dirjen Otonomo Daerah, Dr. Sumarsono, MDM, selaku wakil Pemerintah Pusat, akan mengambil alih pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural jajaran Pemkab Pati, yang direncanakan Jumat, 6 Januari 2017.

Plt Bupati Pati, Budiyono yang dikabarkan hilang akhirnya muncul di Pendopo Pemkab setempat. Budiyono yang juga mantan wakil bupati itu akhirnya bersedia melantik sejumlah pejabat. 671 pejabat struktural Pemkab Pati, di Pendopo Pemkab setempat. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, hadir dan ikut menyaksikan proses pelantikan yang sempat tertunda itu.

Saat memberikan sambutan, Budiyono mengungkapkan permintaan maafnya pada jajarannya, karena pelantikan sempat tertunda. Ia menyebut, kemunduran prosesi ini hanya persoalan administrasi saja.

Sebelumnya, pada Jumat siang, Budiyono juga sempat bertemu Ganjar di Semarang. Menurutnya, ia dan Gubernur berdiskusi dengan tujuan agar birokrasi di Pemkab Pati tetap berjalan. Budiyono juga mengaku tertundanya pengukuhan tak ada kepentingan apapun.

Penutup

Konflik berarti saling berbenturan atau semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonis atau saling bertentangan. Manajemen konflik adalah penerapan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik maupun pihak lain yang tidak terlibat, dalam menghadapi/mengendalikan suatu konflik yang timbul dalam suatu organisasi dalam rangka mengarahkan perselisihan untuk menghasilkan resolusi yang diinginkan sehingga tercapai tujuan organisasi.

Konflik yang penulis bahas mengenai konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Pati mengenai pengukuhan dan pelantikan ASN dan pejabat struktural, dimana Haryanto dan Budiyono berselisih paham dalam menentukan pejabat struktural tersebut. Namun akhirnya berhasil dimediasi oleh Ketua DPRD Pati dengan bantuan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Yang menjadikan Budiyono akhirnya mau melantik dan mengukuhkan pejabat

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

struktural meskipun sempat tertunda satu hari.

Daftar Pustaka

- Chaniago, P. S. (2016). EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 206-222.
- DARMAWAN, I. D. I. (2013). BENTUK RESOLUSI KONFLIK DALAM PILKADA: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 63-83.
- Kartono Kartini. 1992. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Kristianus, K. (2016). POLITIK DAN STRATEGI BUDAYA ETNIK DALAM PILKADA SERENTAK DI KALIMANTAN BARAT. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 90-105.
- Nehrun, I. (2016). Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 42-49.
- Ramadhan, M. F. S., & Wahyudi, T. H. (2016). PEMBIARAN PADA POTENSI KONFLIK DAN KONTESASI SEMU PEMILUKADA KOTA BLITAR: ANALISIS INSTITUSIONALISME PILIHAN RASIONAL. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 143-162.
- Suprayitno, A. 2012 (<http://arsury.blogspot.com/2012/04/manajemen-konflik-3.html>) (Diunduh: 15 Juli 2017, Pukul 20.22) Mandar Maju.
- Suryatna, U. (2007). Hubungan Karakteristik Pemilih dan Terpaan Informasi Kampanye Politik dengan Perilaku Memilih (Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2006).
- Suyatno, S. (2016). PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DAN TANTANGAN DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 223-241.
- Wahyudi. 2011. Manajemen Konflik Dalam Organisasi, Cet. Keempat. Bandung: Alfabeta
- Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik, Jakarta: Salemba Humanika